1. Perkembangan inflasi daerah dan atau perkembangan harga barang kebutuhan pokok dan penting, barang lainnya dan jasa serta risiko ke depan.

   Kabupaten Toba merupakan kabupaten Non IHK namun, Perkembangan harga barang kebutuhan pokok di Kabupaten Toba pada Triwulan III Tahun 2026 menunjukkan dinamika yang cukup beragam dibandingkan dengan kondisi pada Triwulan II Tahun 2026. Secara regional, tekanan inflasi Sumatera Utara menunjukkan kecenderungan menurun, tercermin dari inflasi year-on-year yang pada Juni 2026 sebesar 4,79 persen dan menurun menjadi 2,71 persen pada September 2026. Selama Triwulan III, inflasi year-on-year Sumatera Utara juga tercatat menurun dari 4,20 persen pada Juli menjadi 3,23 persen pada Agustus dan 2,71 persen pada September 2026.

   Meskipun demikian, perkembangan harga komoditas pangan di Kabupaten Toba masih menunjukkan adanya tekanan pada beberapa komoditas tertentu. Berdasarkan hasil pemantauan harga di Pasar Tradisional Balige, komoditas cabai menunjukkan peningkatan harga yang cukup signifikan dibandingkan kondisi pada Triwulan II. Pada Mei 2026, harga cabai merah keriting berada pada kisaran Rp30.000 per kilogram, sedangkan cabai rawit merah dan cabai rawit hijau berada pada kisaran Rp30.000–Rp35.000 per kilogram.

   Memasuki Triwulan III, khususnya pada September 2026, harga cabai mengalami peningkatan. Hasil pemantauan Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Toba pada 17 September 2026 mencatat harga cabai merah keriting sebesar Rp60.000 per kilogram, cabai rawit merah sebesar Rp70.000 per kilogram, cabai rawit hijau sebesar Rp55.000 per kilogram dan cabai hijau keriting sebesar Rp45.000 per kilogram. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa komoditas hortikultura, khususnya cabai, masih menjadi salah satu komoditas yang perlu mendapat perhatian dalam pengendalian inflasi daerah.

   Selain komoditas cabai, pada Triwulan II juga terdapat permasalahan keterjangkauan harga Minyakita. Pada Juni 2026, harga Minyakita di tingkat konsumen di wilayah Balige dilaporkan berada pada kisaran Rp20.000–Rp23.000 per liter, yang antara lain dipengaruhi oleh keterbatasan pasokan. Dinas Koperindag Kabupaten Toba selanjutnya melakukan pemantauan dan koordinasi dengan Bulog untuk menjaga ketersediaan pasokan.

   Dengan demikian, secara umum dapat disimpulkan bahwa tekanan inflasi secara regional mengalami penurunan dari Triwulan II ke Triwulan III, namun di tingkat Kabupaten Toba masih terdapat tekanan harga pada komoditas pangan tertentu, terutama cabai. Kondisi ini menunjukkan bahwa pengendalian inflasi daerah perlu tetap diarahkan pada penguatan ketersediaan pasokan, kelancaran distribusi, keterjangkauan harga, serta peningkatan koordinasi antar-OPD dan pelaku usaha.

2. Identifikasi permasalahan pengendalian inflasi di daerah.

   Berdasarkan hasil pemantauan perkembangan harga bahan kebutuhan pokok, kondisi pasokan pangan, serta pelaksanaan pengendalian inflasi daerah, masih terdapat beberapa permasalahan yang perlu menjadi perhatian Pemerintah Kabupaten Toba pada Triwulan III Tahun 2026 dan periode selanjutnya.

   1. Fluktuasi harga komoditas hortikultura, khususnya cabai, masih menjadi salah satu sumber tekanan harga pangan. Pada September 2026, harga cabai merah keriting di

Pasar Tradisional Balige tercatat sebesar Rp60.000 per kilogram, cabai rawit merah Rp70.000 per kilogram dan cabai rawit hijau Rp55.000 per kilogram. Perubahan harga cabai juga terjadi dalam waktu relatif singkat sehingga memerlukan pemantauan dan intervensi secara berkala.

2. Ketergantungan terhadap pasokan dari luar daerah pada beberapa komoditas pangan masih menjadi tantangan dalam menjaga stabilitas harga. Kondisi tersebut menyebabkan harga komoditas tertentu dipengaruhi oleh perkembangan harga di daerah asal, biaya transportasi serta kelancaran distribusi menuju Kabupaten Toba.
3. Belum optimalnya pengelolaan produksi dan cadangan pangan daerah perlu mendapat perhatian. Sebagian produksi pangan pokok, khususnya beras, masih didistribusikan ke luar daerah sehingga berpotensi mengurangi ketersediaan pasokan di tingkat lokal. Selain itu, pengelolaan cadangan pangan masyarakat masih perlu diperkuat sebagai instrumen untuk menghadapi gangguan pasokan.
4. Risiko gangguan produksi pertanian akibat kondisi cuaca dan kekeringan dapat memengaruhi ketersediaan pangan dan perkembangan harga. Penurunan hasil panen berpotensi menyebabkan berkurangnya pasokan pada periode berikutnya sehingga diperlukan langkah antisipatif melalui penguatan produksi, cadangan pangan dan diversifikasi sumber pangan.
5. Keterjangkauan harga beberapa komoditas strategis masih perlu diperhatikan, termasuk Minyakita. Pada periode tertentu ditemukan harga Minyakita di tingkat konsumen yang berada di atas Harga Eceran Tertinggi (HET), yang antara lain berkaitan dengan keterbatasan stok dan rantai pasok.
6. Akses permodalan dan penguatan kapasitas produksi petani masih perlu ditingkatkan. Keterbatasan permodalan dapat menghambat peningkatan produktivitas dan kontinuitas produksi, terutama untuk komoditas pangan dan hortikultura yang dibutuhkan dalam memenuhi kebutuhan pasar daerah.
7. Penguatan sistem pemantauan harga dan pasokan perlu terus dilakukan secara konsisten. Pemantauan harga telah dilaksanakan pada pasar-pasar tradisional di Kabupaten Toba, namun perlu terus diperkuat dengan integrasi data antar-OPD sehingga perubahan harga dan potensi kelangkaan komoditas dapat diketahui lebih cepat dan diikuti dengan langkah intervensi yang tepat.

Dengan mempertimbangkan kondisi tersebut, pengendalian inflasi Kabupaten Toba perlu diarahkan pada penguatan aspek ketersediaan pasokan, keterjangkauan harga, kelancaran distribusi dan komunikasi efektif, disertai dengan peningkatan koordinasi antar-OPD, penguatan produksi pangan lokal, optimalisasi cadangan pangan serta pelaksanaan intervensi pasar secara tepat sasaran.

3. Pelaksanaan kebijakan pengendalian inflasi di daerah.

Dalam rangka menjaga stabilitas harga dan ketersediaan bahan kebutuhan pokok serta mengendalikan tekanan inflasi daerah, Pemerintah Kabupaten Toba melalui Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) bersama perangkat daerah dan instansi terkait melaksanakan berbagai langkah pengendalian inflasi dengan berpedoman pada aspek keterjangkauan harga, ketersediaan pasokan, kelancaran distribusi dan komunikasi efektif.

Pelaksanaan kebijakan pengendalian inflasi pada Triwulan III Tahun 2026 meliputi:

1. Keterjangkauan Harga

Pemerintah Kabupaten Toba melalui Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan melaksanakan Gerakan Pasar Murah sebagai salah satu bentuk intervensi pemerintah untuk menjaga keterjangkauan harga bahan kebutuhan pokok di tingkat masyarakat. Pada bulan Agustus 2026 telah dilaksanakan Gerakan Pasar Murah sebanyak tiga kali. Kegiatan tersebut ditujukan untuk membantu masyarakat memperoleh kebutuhan pokok dengan harga yang lebih terjangkau sekaligus sebagai upaya menekan gejolak harga dan mengendalikan inflasi daerah.

Gerakan Pasar Murah bersifat terbuka bagi seluruh masyarakat dan tidak hanya ditujukan kepada kelompok masyarakat miskin. Pelaksanaan kegiatan diarahkan sebagai instrumen stabilisasi harga, khususnya terhadap komoditas pangan yang mengalami fluktuasi.

Selain itu, Pemerintah Kabupaten Toba melalui Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan mempersiapkan pelaksanaan Gerakan Pangan Murah (GPM) dengan menyediakan komoditas pertanian seperti bawang merah, cabai merah, tomat dan komoditas lainnya. Dalam pelaksanaannya, komoditas direncanakan diperoleh secara langsung dari petani dan dijual kepada masyarakat tanpa mengambil keuntungan, sehingga diharapkan dapat membantu menjaga keterjangkauan harga sekaligus memberikan akses pasar bagi petani.

2. Ketersediaan Pasokan

Dalam rangka menjaga ketersediaan pangan masyarakat, Pemerintah Kabupaten Toba turut mendukung penyaluran Bantuan Pangan Tahap III periode Juli–September 2026. Bantuan pangan tersebut merupakan bagian dari penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah berupa beras kepada masyarakat penerima manfaat.

Pada September 2026, bantuan pangan tersebut mulai disalurkan kepada sebanyak 24.713 Keluarga Penerima Manfaat (KPM). Kebijakan ini diharapkan dapat membantu memenuhi kebutuhan pangan masyarakat, menjaga daya beli serta mengurangi tekanan terhadap permintaan beras di pasar.

Selain bantuan pangan, upaya menjaga ketersediaan pasokan dilakukan melalui pemantauan perkembangan produksi dan harga komoditas pangan strategis serta koordinasi dengan perangkat daerah terkait.

3. Kelancaran Distribusi

Pemerintah Kabupaten Toba melakukan pemantauan terhadap perkembangan harga dan pasokan bahan kebutuhan pokok di pasar-pasar wilayah Kabupaten Toba. Pemantauan dilakukan terutama terhadap komoditas yang memiliki tingkat volatilitas harga relatif tinggi, antara lain cabai merah keriting, telur ayam dan ayam potong.

Pemantauan tersebut menjadi dasar bagi pemerintah daerah dalam mengidentifikasi potensi gangguan pasokan dan menentukan langkah intervensi yang diperlukan.

Selain itu, koordinasi dengan pihak terkait seperti Bulog dan instansi vertikal dilakukan untuk mendukung kelancaran penyediaan dan distribusi komoditas pangan strategis.

4. Komunikasi Efektif

Pengendalian inflasi daerah dilaksanakan melalui koordinasi dan komunikasi antara Pemerintah Kabupaten Toba, perangkat daerah, instansi vertikal, pelaku usaha serta pemangku kepentingan lainnya.

Pemantauan perkembangan harga bahan kebutuhan pokok menjadi salah satu instrumen komunikasi dan penyediaan informasi bagi Pemerintah Daerah dalam menentukan kebijakan pengendalian inflasi. Data dan informasi mengenai perkembangan harga, pasokan serta komoditas yang mengalami gejolak menjadi bahan dalam menentukan bentuk intervensi yang diperlukan.

Dengan demikian, pelaksanaan kebijakan pengendalian inflasi pada Triwulan III Tahun 2026 diarahkan tidak hanya pada intervensi harga melalui pasar murah, tetapi juga pada penguatan ketersediaan pangan, pemberian bantuan pangan, pemantauan harga dan pasokan serta peningkatan koordinasi antar-OPD dan instansi terkait.

Secara umum, kebijakan pengendalian inflasi Kabupaten Toba pada Triwulan III Tahun 2026 dilaksanakan melalui pendekatan 4K, yaitu keterjangkauan harga, ketersediaan pasokan, kelancaran distribusi dan komunikasi efektif, dengan tetap memperhatikan perkembangan harga komoditas strategis dan kondisi pasokan pangan di daerah.

4. Evaluasi kebijakan pengendalian inflasi di daerah.

    1. Dengan terbentuknya Surat Keputusan Bupati Nomor 9 Tahun 2025 tentang Pembentukan Tim Pengendalian Inflasi Daerah, Kabupaten Toba telah melaksanakan tugas dan fungsinya dalam rangka pengendalian inflasi di Kabupaten Toba.
    2. Anggota TPID Kabupaten Toba melaksanakan monitoring harga ke Pasar Rakyat Tradisional setiap hari pekan yaitu : Pasar Balige setiap hari Jumat, Pasar Laguboti setiap hari senin, Pasar Porsea setiap hari Rabu dan pasar Habinsaran setiap hari selasa.
    3. Pelaksanaan Rapat Koordinasi bersama TPID dalam upaya pengendalian Inflasi di Kabupaten Toba dilaksanakan per Triwulan atau sesuai kebutuhan.
    4. Pasar Murah merupakan salah satu cara untuk menjaga stabilitas harga barang kebutuhan pokok di pasaran dan menekan laju inflasi agar kebutuhan bahan pokok tetap stabil sehingga dapat mendukung daya beli masyarakat.

5. Rekomendasi kebijakan pengendalian inflasi di daerah.

    Berdasarkan hasil pemantauan perkembangan harga bahan kebutuhan pokok, kondisi ketersediaan pasokan, kelancaran distribusi serta pelaksanaan kebijakan pengendalian inflasi pada Triwulan III Tahun 2026, Pemerintah Kabupaten Toba perlu melakukan langkah-langkah pengendalian inflasi secara terintegrasi dan berkelanjutan.

    Rekomendasi kebijakan yang perlu dilakukan adalah sebagai berikut:

    1. **Meningkatkan intensitas pemantauan harga dan pasokan pangan strategis** melalui monitoring secara berkala pada pasar-pasar utama di Kabupaten Toba. Hasil monitoring agar menjadi dasar dalam menentukan komoditas yang memerlukan intervensi serta sebagai sistem peringatan dini terhadap potensi gejolak harga.
    2. **Memperkuat pelaksanaan Gerakan Pasar Murah dan Gerakan Pangan Murah** dengan memprioritaskan komoditas yang mengalami kenaikan harga atau memiliki

tingkat volatilitas tinggi, seperti cabai, bawang, telur dan daging ayam. Pelaksanaan intervensi agar disesuaikan dengan hasil pemantauan harga dan kondisi pasokan di lapangan.

3. **Meningkatkan produksi komoditas pangan dan hortikultura strategis di Kabupaten Toba**, khususnya cabai dan komoditas yang mengalami fluktuasi harga tinggi. Upaya tersebut dapat dilakukan melalui penyediaan benih dan sarana produksi, pendampingan petani, pengaturan pola tanam serta pengembangan kawasan produksi.
4. **Memperkuat pengelolaan cadangan pangan daerah** sebagai instrumen untuk mengantisipasi gangguan pasokan, bencana, penurunan produksi dan gejolak harga. Cadangan pangan perlu dikelola secara terencana dan dapat dimobilisasi pada saat terjadi kondisi yang berpotensi mengganggu stabilitas pangan daerah.
5. **Menjaga stabilitas pasokan dan harga beras** melalui peningkatan koordinasi dengan Bulog, penguatan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah, pemantauan stok serta optimalisasi program bantuan pangan kepada masyarakat.
6. **Memperkuat kelancaran distribusi pangan** dengan melakukan pemetaan rantai pasok komoditas strategis serta mengidentifikasi titik-titik yang berpotensi menimbulkan peningkatan biaya distribusi. Untuk komoditas yang pasokannya masih bergantung pada daerah lain, perlu dilakukan koordinasi dengan daerah pemasok dan pelaku usaha.
7. **Mengembangkan dan memperkuat Kerja Sama Antar Daerah (KAD)** untuk menjamin kesinambungan pasokan komoditas pangan yang belum dapat dipenuhi secara optimal dari produksi Kabupaten Toba. KAD diarahkan terutama pada komoditas strategis dan komoditas yang mengalami fluktuasi harga tinggi.
8. **Meningkatkan pengawasan terhadap komoditas yang memiliki Harga Eceran Tertinggi atau Harga Acuan Pemerintah**, termasuk Minyakita, dengan memastikan ketersediaan pasokan, kelancaran distribusi serta keterjangkauan harga di tingkat konsumen.
9. **Meningkatkan kesiapsiagaan terhadap risiko perubahan iklim dan gangguan cuaca** yang dapat memengaruhi produksi pertanian. Pemerintah daerah bersama perangkat daerah teknis perlu melakukan langkah mitigasi melalui penyesuaian pola tanam, penguatan infrastruktur pendukung produksi dan pengembangan diversifikasi pangan.
10. **Memperkuat koordinasi dan sinergi TPID Kabupaten Toba** melalui penyediaan data yang terintegrasi mengenai harga, produksi, stok dan distribusi pangan. Data tersebut perlu digunakan sebagai dasar dalam merumuskan kebijakan dan menentukan langkah intervensi secara cepat dan tepat.
11. **Meningkatkan komunikasi publik mengenai perkembangan harga dan ketersediaan pangan** melalui penyampaian informasi secara berkala kepada masyarakat. Komunikasi yang efektif diperlukan untuk mencegah kepanikan masyarakat dan mengurangi potensi pembelian berlebihan pada saat terjadi gejolak harga.

Dengan pelaksanaan rekomendasi tersebut, pengendalian inflasi di Kabupaten Toba diharapkan dapat dilakukan secara lebih preventif dan responsif, tidak hanya melalui intervensi harga ketika terjadi kenaikan, tetapi juga melalui penguatan produksi pangan lokal, ketersediaan cadangan pangan, kelancaran distribusi, pengembangan kerja sama antar daerah serta peningkatan kualitas data dan koordinasi TPID.